

Pastikan Status Orang Hilang 1998

Reporter: Lani Diana Wijaya

Editor: Juli Hantoro

Kamis, 14 Maret 2019 06:06 WIB



Keluarga korban kasus penghilangan paksa di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/9). DPR merekomendasikan Presiden segera membentuk Pengadilan HAM Adhoc untuk mengungkap tragedi penculikan dan pembunuhan sejumlah aktivis periode 1997-1998. TEMPO/Imam Sukam

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta memastikan status orang hilang korban penculikan 1998. Permintaan itu datang dari keluarga ke-13 aktivis yang hilang kepada Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di Binagraha, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.

Baca juga: [Sejumlah Keluarga Korban Penculikan Nyatakan Tak Dukung Prabowo](#)

Perwakilan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Mugiyanto menyampaikan, keluarga memerlukan kepastian apakah para aktivis yang hilang masih hidup atau sudah meninggal. "Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR," kata Mugiyanto seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu malam, 13 Maret 2019.

Mugiyanto mewakili keluarga aktivis yang hilang menyampaikan tuntutan lainnya. Mereka meminta pemerintah segera menerbitkan dokumen resmi soal status kependudukan korban hilang.

Tuntutan berikutnya, yakni pemberian kompensasi kepada keluarga korban dengan menjamin biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan. Permintaan terakhir agar pemerintah mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa. "Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi," ucap Mugiyanto.

Baca juga: [Kata BPN Soal Keluarga Korban Orang Hilang Ajak Tak Pilih Prabowo](#)

Dalam kesempatan itu, Moeldoko berjanji bakal meneruskan tuntutan para keluarga [orang hilang](#) korban penculikan 1998 itu kepada Presiden RI Joko Widodo.

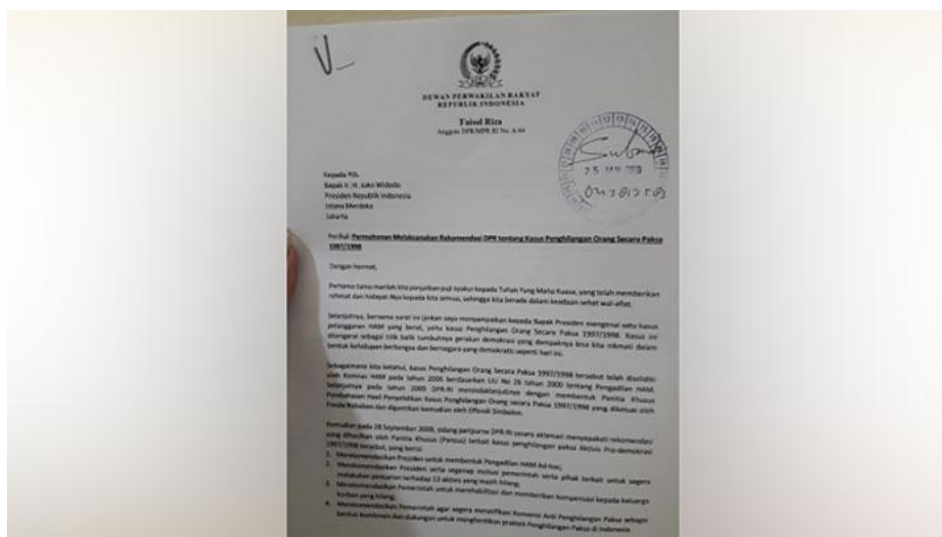
Faisol Riza:

Jokowi Respons Soal Orang Hilang dan Penculikan 1998

Reporter: Budiarti Utami Putri

Editor: Juli Hantoro

Kamis, 14 Maret 2019 08:54 WIB



Surat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Faisol Riza kepada Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus Pembahasan Hasil Penyelidikan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa 1997/1998. Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta - Faisol Riza yang merupakan korban [penculikan 1998](#) mengatakan suratnya kepada Presiden Jokowi telah mendapat respons. Riza mengklaim sudah dipanggil Istana untuk membicarakan tindak lanjut dari permintaannya itu.

Baca juga: [Sejumlah Keluarga Korban Penculikan Nyatakan Tak Dukung Prabowo](#)

"Mereka berkomitmen untuk membantu keluarga korban mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi sehari-hari, secara ekonomi dan pendidikan keluarga," kata Riza di Hotel Grand Cemara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.

Riza sebelumnya mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo dan Presiden Jokowi. Kepada keduanya, politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengingatkan rekomendasi Panitia Khusus Pembahasan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa 1997/1998 yang telah disepakati dalam sidang paripurna DPR 28 September 2009.

Keempat rekomendasi DPR itu secara berurutan ialah pembentukan pengadilan HAM ad hoc, pencarian para korban, rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban, dan ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Riza mengatakan, pemerintah menyatakan bakal memenuhi rekomendasi-rekomendasi itu, termasuk membentuk pengadilan HAM adhoc.

"Mereka berkomitmen untuk melakukan proses semaksimal mungkin untuk melalui prosedur memenuhi kewajiban pemerintah, rehabilitasi dan kompensasi, pengadilan adhoc," kata dia.

Riza adalah satu dari sembilan aktivis korban penculikan 1998 yang kembali. Delapan lainnya ialah Mugiyanto, Aan Rusdianto, Andi Arief, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, dan Rahardjo Waluyo Jati.

Adapun 13 aktivis lainnya masih hilang hingga kini. Mereka adalah Wiji Thukul, Petrus Bimo Anugerah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Uco Siahhaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser.

Kemarin, Riza, Aan, dan Mugiyanto mendampingi sejumlah keluarga korban aktivis yang hilang menggelar konferensi pers. Mereka menyatakan tak akan mendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa itu.

Kendati begitu, para keluarga korban juga tak optimistis terhadap calon presiden 01 Joko Widodo. Sebab, selama empat tahun memerintah Jokowi tak juga menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Namun, keluarga korban menilai proses penuntasan justru akan lebih berat jika Prabowo yang terpilih menjadi presiden.

"Tapi sekarang hanya ada dua kandidat, mau tidak mau kita gantungkan harapan sedikit ke Jokowi," kata Paian Siahhaan, ayah dari Uco Munandar Siahhaan.

Baca juga: [Kata BPN Soal Keluarga Korban Orang Hilang Ajak Tak Pilih Prabowo](#)

Utomo Rahardjo, ayah dari korban orang hilang 1998 Petrus Bimo Anugerah juga pesimistis Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal membentuk pengadilan HAM Adhoc jika kelak terpilih lagi.

Dia menyadari banyak orang di lingkaran Jokowi yang juga diduga terlibat dalam kasus [penculikan 1998](#) dan penghilangan paksa itu, atau terlibat dalam pelanggaran HAM berat lainnya.

"Sangat pesimis, itu enggak akan terwujud. Palang pintunya bukan main kuatnya di sekitar kekuasaan Pak Jokowi," kata Utomo.
